

**DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BEJI**

**NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BEJI,**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten; 2. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Beji, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 21. Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 04); 22. Peraturan Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 09); |

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI**

**dan**

**KEPALA DESA BEJI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

* + - 1. Desa adalah Desa Beji

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
13. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

Pasal 2

1. RPJMDesa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
2. RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

1. RPJMDesa dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa.
3. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

**BAB III**

**SISTEMATIKA RPJMDesa**

Pasal 4

RPJMDesa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;

c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;

d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;

e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;

f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; dan

g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMDesa**

Pasal 6

1. Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDesa.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggarakan pelaksanaan RPJMDesa.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJMDesa.

**BAB V**

**PERUBAHAN RPJMDesa**

Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal:
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
3. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
4. Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat RPJMDesa Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPDesa Tahun 2026 berpedoman pada hasil Evaluasi RPJMDesa Tahun 2020-2025, Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dan kondisi terkini Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Beji

pada tanggal : 17 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI,

**SUPENI**

Diundangkan di Beji

pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DESA,

**ARIFIN**

LEMBARAN DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 03

**LAMPIRAN :**

PERATURAN DESA BEJI

KECAMATAN PANDANARUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI**

**TAHUN 2020-2025**

**PEMERINTAH DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Hubungan RPJMDesa dan Dokumen Perencanaan Lainnya

5. Proses Tahapan Penyusunan RPJMDesa

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA**

* + - 1. Legenda dan Sejarah Desa
      2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa)
      3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa)

1. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa)
2. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa)

**BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA**

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa:

**BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.**

1. Visi

2. Misi

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

**BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIRF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**BAB VII PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJMDesa maupun RKPDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APBDesa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJMDesa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

**B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 disusun berdasarkan pada:

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 21. Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 04); 22. Peraturan Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 09); |

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMDesa Beji Tahun 2020–2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Beji yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMDesa Beji Tahun 2020–2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Beji Tahun 2020–2025;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; dan

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa.

**D. HUBUNGAN RPJMDesa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Beji khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPDesa.

Selanjutnya, RPJMDesa setiap akan dijabarkan dalam bentuk RKPDesa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBDesa Pemerintah Desa Beji

**E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa**

Proses Penyusunan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJMDesa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan RPJMDesa.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DESA**

1. **LEGENDA DAN SEJARAH DESA**

1. **LEGENDA DESA**

Setelah selesainya terjadinya perang diponegoro, kolonial belanda berusaha keras menghabisi seluruh prajurit dipenegro, sehingga pada tahun 1930 para prajurit pejuang diponegoro banyak yang lari dari kejaran para kolonial belanda karena akan dibunuh, salah satunya adalah tokoh perang diponegoro “ Mangun Yudha” yang menghindari kejaran kolonial belanda lari kehutan berantara beserta prajuritnya dan akhirnya singgah disuatu tempat, tempat tersebut terdapat banyak sekali sumber mata air yang jernih, yang berada disekitar gunung jaran. Karena singgah diwilayah tersebut terasa nyaman dan aman , maka mangun Yudha beserta prajuritnya menetap di wilayah tersebut yang diberinama “ Beji “ yang artinya sumber mata air yang sekarang pemukiman tersebut bernama Beji wetan.

Waktu terus berjalan, Mangun Yudha beserta prajuritnya merasa nyaman dan aman terhindar dari kejaran kolonial belanda, sehingga para prajurit perang Diponegoro yang masih hidup serta masyarakat umum yang tinggal di Wanadadi, susukan, Punggelan, Losari, Purbalingga dan Pemalang mendengar bahwa Beji yang ditempati Mangun yudha adalah tempat yang subur dan makmur sehingga mereka menyusul ketempat tersebut, yang akhirnya lama kelamaan mereka mendirikan pemukiman disekitar gunung jaran yang sekarang diberi nama, Beji Tengah, Beji Kulo, Beji serang dan Beji Wetan.

Konon Mangun Yudha adalah orang yang cerdas dan pemberani, sehingga penduduk wilayah beji menjadikan beliau sebagai pemimpin pertama diwilayah beji yang menjabat seumur hidup.

**2. SEJARAH DESA**

Desa Beji adalah Desa yang terbentuk karena dijadikan tempat untuk persembunyian para Tentara Perang Diponegoro karena dianggap menjadi tempat yang cukup setrategis dan aman untuk menghindar dari kejaran kolonial belanda saat itu, sehingga Desa Beji adalah salah satu desa yang dituju banyak orang sebagai tempat tinggal tetap.

Desa Beji, pada saat dipimpin oleh mangun Yudha belum ada krekturan / kecamatan, namun setelah kepemimpinan Desa Beji jatuh pada Sura Wedana sudah terbentuk krekturan Pandanarum, sehingga Desa Beji masuk dalam krekturan tersebut, setelah Sura Wedana mengundurkan diri dari kepemimpinannya karena membunuh pimpinan garong dari pemalang, maka Desa Beji dipimpinan oleh Rawit, Deram, yang menjabat sebagai pemimpin desa beji seumur hidup, setelah rawit dan deram meninggal dunia, maka kepemimpinan jatuh ke Suro Redjo yang pada saat itu Beji termasuk dalam Kecamatan Kalibening.

Sehingga sampai saat ini warga masyarakat Desa Beji, banyak yang berasal dari keturunan Desa – desa di sekitar Kabupaten Banjarnegara yang ini merupakan adanya pindahan para prajurit perang diponegoro dan masyarakat yang berasal dari Desa-desa disekitar wilayah Kabupaten Banjarnegara.

**SEJARAH KEPEMIMPINAN DESA BEJI DALAM MASA KE MASA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **PEMIMPIN (KEPALA DESA)** | **KETERANGAN** |
| 1 | Mangun Yudha | Seumur Hidup |
| 2 | Sura Wedana | Mengundurkan diri karena membunuh pimpinan garong dari Pemalang |
| 3 | Rawit | Seumur Hidup |
| 4 | Deram | Seumur Hidup |
| 5 | Suro Redjo | Seumur Hidup |
| 6 | Suro Mihardjo | Seumur Hidup |
| 7 | Suro hardjono | Menjabat 10 Tahun  ( 1982 – 1992 ) |
| 8 | Sumasis Siswo Atmojo | Menjabat 8 Tahun  ( 1992 – 2000 ) |
| 9 | Suparjo | Menjabat 14 Tahun  ( 2000 – 2014 ) |
| 10 | Siti Aminah | Menjabat 6 Tahun  ( 2014 – 2019 ) |
| 11 | Supeni | Menjabat 6 Tahun  ( 2019 – 2025 ) |

1. **POTENSI SUMBER DAYA ALAM (Data Profil Desa 2019)**

**Batas Wilayah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batas** | **Desa/Kelurahan** | **Kecamatan** |
| Sebelah utara | Desa Pringamba | Pandanarum |
| Sebelah selatan | Desa Pandanarum | Pandanarum |
| Sebelah timur | Desa Kalibening, Asinan | Kalibening |
| Sebelah barat | Desa Pringamba | Pandanarum |

* + - 1. **Penetapan Batas dan Peta Wilayah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Penetapan Batas** | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Sudah ada/belum ada | Perdes No ................. | **Ada**/tidak |
| Perda No .................. |

**2. Luas wilayah menurut penggunaan**

|  |  |
| --- | --- |
| Luas Tanah sawah | 66,41. ha/m2 |
| Luas Tanah Kering | 311,10. ha/m2 |
| Luas Tanah Basah | . ha/m2 |
| Luas Tanah Perkebunan | 115,4. ha/m2 |
| Luas Fasilitas Umum | 17,50. ha/m2 |
| Luas Tanah hutan | 120,00. ha/m2 |
| **Total luas** | **630,42. ha/m2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TANAH SAWAH** |  |
| Sawah irigasi teknis | 20,14. ha/m2 |
| Sawah irigasi ½ teknis | 30,55. ha/m2 |
| Sawah tadah hujan | 15,72. ha/m2 |
| Sawah pasang surut | - ha/m2 |
| .......................... | - ha/m2 |
| **Total luas** | **66,41. ha/m2** |
|  |  |
| **TANAH KERING** |  |
| Tegal/ladang | 283,44. ha/m2 |
| Pemukiman | 15,36. ha/m2 |
| Pekarangan | 12,30. ha/m2 |
| ............................ | - ha/m2 |
| **Total luas** | **311,10. ha/m2** |
|  |  |
| **TANAH BASAH** |  |
| Tanah rawa | * ha/m2 ha/m2 |
| Pasang surut | - ha/m2 |
| Lahan gambut | - ha/m2 |
| Situ/waduk/danau | - ha/m2 |
| .............. | -ha/m2 |
| **Total luas** | **- ha/m2** |
|  |  |
| **TANAH PERKEBUNAN** |  |
| Tanah perkebunan rakyat | 115,41. ha/m2 |
| Tanah perkebunan negara | - ha/m2 |
| Tanah perkebunan swasta | - ha/m2 |
| Tanah perkebunan perorangan | - ha/m2 |
| **Total luas** | **115,41. ha/m2** |
|  |  |
| **TANAH FASILITAS UMUM** |  |
| Kas Desa/Kelurahan: | 10,47. ha/m2 |
| a. Tanah bengkok | 10,47. ha/m2 |
| b. Tanah titi sara | - ha/m2 |
| c. Kebun desa | - ha/m2 |
| d. Sawah desa | - ha/m2 |
| Lapangan olahraga | 0,64. ha/m2 |
| Perkantoran pemerintah | 0,13. ha/m2 |
| Ruang publik/taman kota | - ha/m2 |
| Tempat pemakaman desa/umum | 2,80. ha/m2 |
| Tempat pembuangan sampah | - ha/m2 |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 1,70. ha/m2 |
| Pertokoan | -ha/m2 |
| Fasilitas pasar | 0 5ha/m2 |
| Terminal | -ha/m2 |
| Jalan | 1,56 ha/m2 |
| Daerah tangkapan air | - ha/m2 |
| Usaha perikanan | 0,20. ha/m2 |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | - ha/m2 |
| **Total luas** | **17.50. ha/m2** |
|  |  |
| **TANAH HUTAN** |  |
| Hutan lindung | 120.00.ha/m2 |
| Hutan produksi | - ha/m2 |
| a. Hutan produksi tetap | - ha/m2 |
| b. Hutan terbatas | - ha/m2 |
| Hutan konservasi | - ha/m2 |
| Hutan adat | - ha/m2 |
| Hutan asli | ha/m2 |
| Hutan sekunder | - ha/m2 |
| Hutan buatan | -ha/m2 |
| Hutan mangrove | - ha/m2 |
| Hutan suaka | - ha/m2 |
| a. Suaka alam | - ha/m2 |
| b. Suaka margasatwa |  |
| Hutan rakyat |  |
| ...................... | - ha/m2 |
| **Total luas** | **120.00. ha//,m2** |

**3. Iklim**

|  |  |
| --- | --- |
| Curah hujan | 60.00 Mm |
| Jumlah bulan hujan | 7 bulan |
| Kelembapan | 40.00 |
| Suhu rata-rata harian | 26 s/d 27.0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 9.000.00 mdl |

**4. Jenis dan kesuburan tanah**

|  |  |
| --- | --- |
| Warna tanah (sebagian besar) | Merah/kuning**/hitam**/abu-abu |
| Tekstur tanah | **Lampungan**/pasiran/debuan |
| Tingkat kemiringan tanah | 35.00derajat |
| Lahan kritis | 1,25. ha/m2 |
| Lahan terlantar | - ha/m2 |
|  |  |
| **Tingkat erosi tanah** |  |
| Luas tanah erosi ringan | -ha/m2 |
| Luas tanah erosi sedang | -ha/m2 |
| Luas tanah erosi berat | -ha/m2 |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | -.ha/m2 |

**5. Topografi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentangan wilayah |  |  | | |
| Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 38.70.ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 380.50.ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 211.46ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | -ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | -ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | -ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | -ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | -ha/m2 | | |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | -ha/m2 | | |
| Lain-Lain |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **Letak** |  |  | | |
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | ya | | 1.70ha/m2 | |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | ya | | 310ha/m2 | |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/kelurahan kawasan industri | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan kepulauan | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan pantai/pesisir | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan kawasan hutan | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan taman suaka | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan kawasan wisata | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | ya | | 12.77ha/m2 | |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/kelurahan rawan banjir | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/kelurahan bebas banjir | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | tidak | | -ha/m2 | |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | tidak | | -ha/m2 | |
|  |  |  | | |
| **Orbitasi** |  |  | | |
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 1,25 Km | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,25 Jam | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor | 0,30 Jam | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1 Jam | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 5 Jam | | | |
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 0,00 unit | | | Tidak ada |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 276 Km | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan  kendaraan bermotor | 5 Jam | | | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 55 Jam | | | |
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00unit | | | Tidak ada |

**B. PERTANIAN**

**B.1. TANAMAN PANGAN**

**1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 627 keluarga |
| Tidak memiliki | 19 keluarga |
| Memiliki kurang 10 ha | 624 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 3 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0,00 keluarga |
| Memiliki lebih dari 100 ha | 0,00 keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | 646 keluarga |
|  |  |

* + - 1. **Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jagung | 6.00 Ha | 1.30 Ton/ha |
| Kacang tanah | 1.20Ha | 2.20 Ton/ha |
| Padi sawah | 56.00Ha | 3.00 Ton/ha |
| Tumpang sari | 12.00 Ha | 2.00Ton/ha |
| Ubi kayu | -Ha | -Ton/ha |
| Cabe | 0.70 Ha | 2.70 Ton/ha |

**3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan**

1. **Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 143 keluarga |
| Tidak memiliki | 501 keluarga |
| Memiliki kurang dari 10 ha | 143 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | -keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | -keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | -keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | -keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | -keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 644 keluarga |
|  |  |

1. **Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis | Luas(ha) | Hasil panen(Ton/ha |
| Salak | -Ha | 1.50 Ton/Ha |
| Pepaya | -Ha | 3.00 Ton/Ha |
| Pisang | -Ha | 2.00 Ton/Ha |

**4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman** **Buah-buahan**

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | **Ya/**Tidak |
| Dijual ke pasar | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui KUD | **Ya** /Tidak |
| Dijual melalui tengkulak | Ya /**Tidak** |
| Dijual melalui pengecer | **Ya** /Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | **Ya** /Tidak |
| Tidak dijual | **Ya** /Tidak |

**B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA**

**C. PERKEBUNAN**

1. Pemilikan Lahan Perkebunan

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 320 keluarga |
| Tidak memiliki | 324 keluarga |
| Memiliki kurang dari 5 ha | 320 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | -keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | -keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | -keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | -keluarga |
| Total Keluarga Perkebunan | 644 keluarga |

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis | Swasta/negara | | Rakyat | |
| Luas (ha) | Hasil  (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil  (kw/ha) |
| Kelapa | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1.500,00 |
| Kopi | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.600,00 |
| Cengkeh | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 800,00 |
| Coklat | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,200,00 |
| Teh | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 1.500,00 |

3. Pemasaran Hasil Perkebunan

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | Ya |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Ya |

**D. KEHUTANAN**

**1. Luas Lahan Menurut Pemilikan**

|  |  |
| --- | --- |
| Milik Negara | 0,00 ha |
| Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | 221,00 ha |
| Milik masyarakat perorangan | 283,44 ha |
| Total | 504,44 ha |

**2. Hasil. Hutan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kayu | 1.500,00 M3/Th |  |
| Bambu | 150,00 M3/Th |  |
| Enau | 10,00 M3/Th |  |
| Mahoni | 50,00 M3/Th |  |
| Gula Aren | 10,00 Ton/Th |  |
| Kayu Sengon | 1.700,00 M3/Th |  |

**3. Kondisi Hutan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondisi Hutan | Baik | ~~Rusak~~ | Total |
| Hutan Produksi | 283,44 ha | - ha | 283,44 ha |

**4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan**

|  |  |
| --- | --- |
| Pencemaran Udara | Tidak |
| Pencemaran Air | Tidak |
| Longsor/Erosi | Tidak |
| Bising | Tidak |
| Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | Ada |
| Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | Ada |
| Hilangnya sumber mata air | Ada |
| Kebakaran hutan | Tidak |
| Terjadinya kekeringan/sulit air | Tidak |
| Berubahnya fungsi hutan | Tidak |
| Terjadinya lahan kritis | Tidak |
| Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | Ada |
| Musnahnya Habitat Binatang Hutan | Tidak |
| .................................. | Ada/Tidak |

**5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan**

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke pasar | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui KUD | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | **Ya**/Tidak |
| Tidak dijual | **Ya**/Tidak |

**E. PETERNAKAN**

**1. Jenis populasi ternak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah  Populasi |
| Sapi | 377 orang | 554 ekor |
| Kerbau | 3 orang | 10 ekor |
| Ayam kampung | 173 orang | 2.500 ekor |
| Jenis ayam boiler | 3 Orang | 200 ekor |
| Bebek | 10 orang | 56 ekor |
| Kambing | 835 orang | 930. ekor |
| Angsa | 350 orang | 700 ekor |
| Kelinci | 5 orang | 18 ekor |
| Anjing | 3 orang | 5 ekor |
| Kucing | 100 orang | 120 ekor |

**2. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak**

|  |  |
| --- | --- |
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 7,00 ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | 32,00Ton/ha |
| Luas lahan gembalaan | 8,00 ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | - Ton |
| Disubsidi dinas | - Ton |
| ........................................................................... | -.Ton |

**3. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak**

|  |  |
| --- | --- |
| Dendeng | -orang |
| Abon | -orang |
| Penyamakan Kulit | -orang |
| Madu Lebah | -orang |
| Biogas | -orang |
| Telur Asin | -orang |
| Krupuk Kulit | -orang |
| Penyemakan kulit | -orang |
| Kerajinan tangan (*handy craft*) | -orang |

**4. Pemasaran Hasil Ternak**

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui KUD | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui tengkulak | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui pengecer | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | **Ya**/Tidak |
| Tidak dijual | Ya/**Tidak** |

**5. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan**

|  |  |
| --- | --- |
| Milik masyarakat umum | - ha |
| Milik perusahaan peternakan (ranch) | - ha |
| Milik perorangan | 8,00 ha |
| Sewa pakai | - ha |
| Milik pemerintah | - ha |
| Milik masyarakat adat | - ha |

**F. PERIKANAN**

**1. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empang/kolam | 0,09 ha/m2 | 0,6 ton/th |

**2. Jenis ikan dan produksi**

|  |  |
| --- | --- |
| Bawal | 0,20 ton/th |
| Mas | 0,13 ton/th |
| Mujair | 0,20 ton/th |
| Lele | 3.000,00 ton/th |
| Nila | 0,10 ton/th |
| Gurame | 700,00 ton/th |
|  |  |

* + - 1. **Pemasaran Hasil Perikanan**

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | Ya/**Tidak** |
| Dijual melalui KUD | Ya/ **Tidak** |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya/ **Tidak** |
| Dijual melalui Pengecer | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/**Tidak** |
| Tidak dijual |  |

**G. BAHAN GALIAN**

1. **Jenis dan deposit bahan galian**

|  |  |
| --- | --- |
| Batu kali | Ada |
| Batu gunung | Tidak |
| Batu kapur | Tidak |
| Pasir | Tidak |
| Emas | Tidak |
| Nikel | Tidak |
| Belerang | Tidak |
| Batu marmer | Tidak |
| Batu cadas | Tidak |
| Batu apung | Tidak |
| Pasir kwarsa | Tidak |
| Batubara | Tidak |
| Batu Granit | Tidak |
| Batu Gamping | Tidak |
| Mangan | Tidak |
| Batu Trass | Tidak |
| Batu Putih | Tidak |
| Pasir Batu | Tidak |
| Pasir Besi | Tidak |
| Batu Gips | Tidak |
| Minyak Bumi | Tidak |
| Gas Alam | Tidak |
| Kulit kerang | Tidak |
| Timah | Tidak |
| Tanah Garam | Tidak |
| Biji Besi | Tidak |
| Uranium | Tidak |
| Bouxit | Tidak |
| Tanah liat | Tidak |

**2. Produksi Batu bahan galian**

|  |  |
| --- | --- |
| Batu gunung | ~~Besar~~/Sedang/~~Kecil~~ |
| Batu kali | ~~Besar/Sedang~~/Kecil |

1. **Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis & produksi  bahan galian | Pengelola/pemilik |
| Batu kali | Perorangan |
| Batu kapur | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Pasir | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Emas | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Kuningan | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Aluminium | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Perunggu | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Belerang | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu marmer | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu cadas | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu apung | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Pasir kwarsa | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batubara | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu Granit | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu Gamping | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Mangaan | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu Trass | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Batu Putih | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Pasir Batu | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Pasir Besi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Gips | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Minyak Bumi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Gas Alam | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Perak | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Timah | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Tembaga | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Biji Besi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Uranium | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Bouxit | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
| Garam | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |

**4. Pemasaran Hasil Galian**

|  |  |
| --- | --- |
| Dijual langsung ke konsumen | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke pasar | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui KUD | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | **Ya**/Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke perusahaan | **Ya**/Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | **Ya**/Tidak |
| Tidak dijual | **Ya**/Tidak |

**H. SUMBER DAYA AIR**

**1. Potensi Air dan Sumber Daya Air**

|  |  |
| --- | --- |
| Sungai | Sedang |
| Danau | - |
| Mata Air | Sedang |
| Bendungan/waduk/situ | - |
| Embung-embung | - |
| Jebakan air | - |

**2. Sumber Air Bersih**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis | Jumlah  (Unit) | Pemanfaat  (KK) | Kondisi  Baik/Rusak |
| Mata air | 47 | 563 | Baik |
| Sumur gali | 9 | 25 | Baik |
| Sumur pompa | 1 | 1 | Baik |
| Hidran umum | - |  | - |
| PAM | - |  | - |
| Pipa | 28 | 654 | Baik |
| Sungai | - | - | - |
| Embung | - | - | - |
| Bak penampung air hujan | - | - | - |
| Beli dari tangki swasta | - | 247 | Baik |
| Depot isi ulang | 1 | - | - |
| Sumber lain | - | - | - |

**3. Kualitas Air Minum**

|  |  |
| --- | --- |
| Mata air | Baik |
| Sumur gali | Baik |
| Sumur pompa | ~~Berbau/berwarna/berasa~~/baik |
| Hidran umum | Berbau/berwarna/berasa/baik |
| PAM | Berbau/berwarna/berasa/baik |
| Pipa | Baik |
| Sungai | Baik |
| Bak penampung air hujan | Berbau/berwarna/berasa/baik |
| Beli dari tangki swasta | Berbau/berwarna/berasa/baik |
| Depot isi ulang | Berbau/berwarna/berasa/baik |

**4. Sungai**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah sungai | 4 buah |
| Kondisi | |
| Tercemar | tidak |
| Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | tidak |
| Keruh | tidak |
| Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | Ya |
| Berkurangnya biota sungai | tidak |
| Kering | tidak |

**5. Rawa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luas rawa | - ha | |
| Pemanfaatan | | |
| Perikanan darat maupun laut | Ya/ tidak | |
| Air baku untuk pengolahan air minum | | Ya/ tidak |
| Cuci dan mandi | | Ya/ tidak |
| Irigasi | | Ya/ tidak |
| Buang air besar | | Ya/ tidak |
| Perikanan | | Ya/ tidak |
| Sayuran | | Ya/ tidak |
| Pembudidayaan hutan manggrove | | Ya/ tidak |

**6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ**

|  |  |
| --- | --- |
| Luas | - ha |
| Pemanfaatan | |
| Perikanan | Ya/ tidak |
| Air Minum/Air Baku | Ya/ tidak |
| Cuci dan mandi | Ya/ tidak |
| Irigasi | Ya/ tidak |
| Buang air besar | Ya/ tidak |
| Pembangkit listrik | Ya/ tidak |
| Prasarana transportasi | Ya/ tidak |
| Lainnya..................................................... | Ya/ tidak |
| Kondisi | |
| Tercemar | Ya/ tidak |
| Pendangkalan | Ya/ tidak |
| Keruh | Ya/ tidak |
| Berlumpur | Ya/ tidak |
|  |  |

**7. Air Panas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumber | Jumlah  Lokasi | Pemanfaatan  (wisata, Pengobatan Energi, dll) | Kepemilikan/Pengelolaan | | |
| Pemda | Swasta | Adat/ Perorangan |
| Gunung  Berapi |  |  |  |  |  |
| Geiser |  |  |  |  |  |

1. **KUALITAS UDARA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan  Pencemar | Efek terhadap  Kesehatan  (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Kepemilikan | | |
| Pemda | Swasta | Per- orangan |
| Pabrik (kapur,  marmer, dll) |  |  |  |  |  |  |
| Kendaraan  Bermotor |  |  |  |  |  |  |
| Pembakaran  Hutan/Lahan  Gambut |  |  |  |  |  |  |

**J.** **KEBISINGAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan  (kendaraan  bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Tinggi | Tidak |  |  |
| Kebisingan sedang | Tidak |  |  |
| Kebisingan Ringan | Ya | Kendaraan bemotor | Sulit istirahat |
| Tidak Bising | Tidak |  |  |
|  |  |  |  |

**K. RUANG PUBLIK/TAMAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat  Pemanfaatan  (Aktif/Pasif) |
| Taman Kota | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |
| Taman Bermain | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |
| Hutan Kota | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |
| Taman Desa/Kel. | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |
| Tanah Kas Desa | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |
| Tanah Adat | ada/ tidak ada | ...........M² | Aktif/Pasif |

**L. POTENSI WISATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Danau (Wisata Air,  Hutan Wisata, Situs  Purbakala, dll) | Ada/tidak | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Agrowisata | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Hutan Khusus | Ada/Tidak ada | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Goa | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Cagar Budaya | Ada/Tidak ada | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Arung Jeram | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Situs Sejarah, dan museum | Ada/Tidak ada | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Air Terjun | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Padang Savana (wisata Padang Savana) | Ada/Tidak Ada | ............. ha | Aktif/Pasif |
| ................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Danau (Wisata Air,  Hutan Wisata, Situs  Purbakala, dll) | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Agrowisata | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Hutan Khusus | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Goa | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Cagar Budaya | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Arung Jeram | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Situs Sejarah, dan museum | Ada/Tidak ada | ...........ha | Aktif/Pasif |
| Air Terjun | Ada/tidak | ............. ha | Aktif/Pasif |
| Padang Savana (wisata Padang Savana) | Ada/Tidak Ada | ............. ha | Aktif/Pasif |

1. **POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (Data Profil Desa 2019)**

A. JUMLAH

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah laki-laki | 1.354 orang |
| Jumlah perempuan | 1.447 orang |
| Jumlah total | 2.801 orang |
| Jumlah kepala keluarga | 655 KK |
| Kepadatan Penduduk | 444,31per km |

B. USIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usia** | | **Laki-laki** | | **Perempuan** | | **Usia** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 0-12 bulan | | 13, orang | | 16, orang | | 39 | 13, orang | 15, orang |
| 1 tahun | | 17, orang | | 18, orang | | 40 | 17, orang | 13, orang |
| 2 | | 12, orang | | 14, orang | | 41 | 12, orang | 13, orang |
| 3 | | 12, orang | | 15, orang | | 42 | 14, orang | 12, orang |
| 4 | | 14, orang | | 16, orang | | 43 | 15, orang | 20, orang |
| 5 | | 13, orang | | 17, orang | | 44 | 14, orang | 23, orang |
| 6 | | 15, orang | | 16, orang | | 45 | 12, orang | 16, orang |
| 7 | | 14, orang | | 17, orang | | 46 | 13, orang | 24, orang |
| 8 | | 17, orang | | 7, orang | | 47 | 21, orang | 34, orang |
| 9 | | 16, orang | | 19, orang | | 48 | 24, orang | 24, orang |
| 10 | | 16, orang | | 17, orang | | 49 | 22, orang | 23, orang |
| 11 | | 15, orang | | 18, orang | | 50 | 25, orang | 23, orang |
| 12 | | 14, orang | | 15, orang | | 51 | 23, orang | 24, orang |
| 13 | | 17, orang | | 16, orang | | 52 | 24, orang | 24, orang |
| 14 | | 15, orang | | 16, orang | | 53 | 23, orang | 22, orang |
| 15 | | 14, orang | | 16, orang | | 54 | 23, orang | 23, orang |
| 16 | | 16, orang | | 17, orang | | 55 | 22, orang | 23, orang |
| 17 | | 12, orang | | 14, orang | | 56 | 22, orang | 23, orang |
| 18 | | 13, orang | | 14, orang | | 57 | 21, orang | 24, orang |
| 19 | | 15, orang | | 16, orang | | 58 | 23, orang | 23, orang |
| 20 | | 13, orang | | 17, orang | | 59 | 22, orang | 24, orang |
| 21 | | 13, orang | | 14, orang | | 60 | 24, orang | 23, orang |
| 22 | | 15, orang | | 14, orang | | 61 | 23, orang | 24, orang |
| 23 | | 14, orang | | 19, orang | | 62 | 22, orang | 24, orang |
| 24 | | 16, orang | | 15, orang | | 63 | 22, orang | 23, orang |
| 25 | | 12, orang | | 20, orang | | 64 | 19, orang | 24, orang |
| 26 | | 20, orang | | 16, orang | | 65 | 22, orang | 17, orang |
| 27 | | 18, orang | | 16, orang | | 66 | 23, orang | 24, orang |
| 28 | 16, orang | | 22, orang | | 67 | | 24, orang | 25, orang |
| 29 | 14, orang | | 19, orang | | 68 | | 23, orang | 24, orang |
| 30 | 12, orang | | 16, orang | | 69 | | 24, orang | 25, orang |
| 31 | 12, orang | | 13, orang | | 70 | | 23, orang | 25, orang |
| 32 | 14, orang | | 12, orang | | 71 | | 23, orang | 26, orang |
| 33 | 16, orang | | 15, orang | | 72 | | 23, orang | 26, orang |
| 34 | 11, orang | | 15, orang | | 73 | | 25, orang | 26, orang |
| 35 | 12, orang | | 13, orang | | 74 | | 25, orang | 25, orang |
| 36 | 12, orang | | 13, orang | | 75 | | 23, orang | 20, orang |
| 37 | 14, orang | | 12, orang | | Lebih dari 75 | | 22, orang | 24, orang |
| 38 | 13,orang | | 13 orang | | Total | | **1354 orang** | **1447 orang** |

C. PENDIDIKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 25, orang | 44, orang |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 35, orang | 48, orang |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 2, orang | 1, orang |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 69, orang | 83, orang |
| Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 112, orang | 132, orang |
| Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat | 93, orang | 91, orang |
| Tamat SD/sederajat | 68, orang | 75, orang |
| Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 224, orang | 231, orang |
| Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 441, orang | 453, orang |
| Tamat SMP/sederajat | 242, orang | 238, orang |
| Tamat SMA/sederajat | 29, orang | 33, orang |
| Tamat D-1/sederajat | -, orang | , orang |
| Tamat D-2/sederajat | 2, orang | 2, orang |
| Tamat D-3/sederajat | 2, orang | 2, orang |
| Tamat S-1/sederajat | -, orang | , orang |
| Tamat S-2/sederajat | 10, orang | 1, orang |
| Tamat S-3/sederajat | , orang | , orang |
| Tamat SLB A | , orang | , orang |
| Tamat SLB B | , orang | , orang |
| Tamat SLB C | , orang | , orang |
| Jumlah Total | 2.801 orang | |

1. MATA PENCAHARIAN POKOK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | | Perempuan |
| Petani | 1.325, orang | | 394, orang |
| Buruh tani | 314, orang | | 37, orang |
| Buruh migran perempuan | , orang | | , orang |
| Buruh migran laki-laki | , orang | | , orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 13, orang | | 4, orang |
| Pengrajin industri rumah tangga | , orang | | , orang |
| Pedagang keliling | , orang | | , orang |
| Peternak | 525, orang | | 130, orang |
| Nelayan | , orang | | , orang |
| Montir | 3, orang | | , orang |
| Dokter swasta | , orang | | , orang |
| Bidan swasta | , orang | | 2, orang |
| Perawat swasta | , orang | | , orang |
| Pembantu rumah tangga | 6, orang | | , orang |
| TNI | , orang | | , orang |
| POLRI | , orang | | , orang |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 5, orang | | 1, orang |
| Pengusaha kecil dan menengah | 18, orang | | 3, orang |
| Pengacara | , orang | | , orang |
| Notaris | , orang | | , orang |
| Dukun Kampung Terlatih | , orang | | 3, orang |
| Jasa pengobatan alternatif | , orang | | , orang |
| Dosen swasta | , orang | | , orang |
| Pengusaha besar | , orang | | , orang |
| Arsitektur | , orang | | , orang |
| Seniman/Artis | , orang | | , orang |
| Karyawan perusahaan swasta | , orang | | , orang |
| Karyawan perusahaan pemerintah | , orang | , orang | | |
| Jumlah Total Penduduk 2.798 orang | | | | |

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agama | Laki-laki | Perempuan |
| Islam | 1.354 orang | 1.447 orang |
| Kristen | ............... orang | ............... orang |
| Katholik | ............... orang | ............... orang |
| Hindu | ............... orang | ............... orang |
| Budha | ............... orang | ............... orang |
| Khonghucu | ............... orang | ............... orang |
| Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ............... orang | ............... orang |
| Aliran Kepercayaan lainnya | ............... orang | ............... orang |
| **Jumlah** | **1.354 orang** | **1.447 orang** |

F. KEWARGANEGARAAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
| Warga Negara Indonesia | 1.354 orang | 1.447 orang |
| Warga Negara Asing | orang | .................. orang |
| Dwi Kewarganegaraan | ................. orang | .................. orang |
| **Jumlah** | **1.354 orang** | **1.447 orang** |

F. ETNIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etnis | Laki-laki | Perempuan |
| Aceh | ...................... orang | ...................... orang |
| Batak | ...................... orang | ...................... orang |
| Nias | ...................... orang | ...................... orang |
| Mentawai | ...................... orang | ...................... orang |
| Melayu | ...................... orang | ...................... orang |
| Minang | ...................... orang | ...................... orang |
| Kubu | ...................... orang | ...................... orang |
| Anak Dalam | ...................... orang | ...................... orang |
| Badui | ...................... orang | ...................... orang |
| Betawi | ...................... orang | ...................... orang |
| Sunda | 5 orang | ...................... orang |
| Jawa | 1.354 orang | 1.447 orang |
| Madura | ...................... orang | ...................... orang |
| Bali | ...................... orang | ...................... orang |
| Banjar | ...................... orang | ...................... orang |
| Dayak | ...................... orang | ...................... orang |
| Bugis | ...................... orang | ...................... orang |
| Makasar | ...................... orang | ...................... orang |
| Mandar | ...................... orang | ...................... orang |
| Sasak | ...................... orang | ...................... orang |
| Ambon | ...................... orang | ...................... orang |
| Minahasa | ...................... orang | ...................... orang |
| Flores | ...................... orang | ...................... orang |
| Papua | ...................... orang | ...................... orang |
| Timor | ...................... orang | ...................... orang |
| Sabu | ...................... orang | ...................... orang |
| Rote | ...................... orang | ...................... orang |
| Sumba | ...................... orang | ...................... orang |
| Ternate | ...................... orang | ...................... orang |
| Tolaki | ...................... orang | ...................... orang |
| Buton | ...................... orang | ...................... orang |
| Muna | ...................... orang | ...................... orang |
| Mikongga | ...................... orang | ...................... orang |
| Wanci | ...................... orang | ...................... orang |
| Alor | ...................... orang | ...................... orang |
| Benoa | ...................... orang | ...................... orang |
| Tunjung | ...................... orang | ...................... orang |
| Mbojo | ...................... orang | ...................... orang |
| Samawa | ...................... orang | ...................... orang |
| Asia | ...................... orang | ...................... orang |
| Afrika | ...................... orang | ...................... orang |
| Australia | ...................... orang | ...................... orang |
| China | ...................... orang | ...................... orang |
| Amerika | ...................... orang | ...................... orang |
| Eropa | ...................... orang | ...................... orang |
| Jumlah | 1.359 orang | 1.447 . orang |

H.CACAT MENTAL DAN FISIK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cacat Fisik** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| Tuna rungu | 2, orang | , orang |
| Tuna wicara | 1, orang | 1, orang |
| Tuna netra | , orang | , orang |
| Lumpuh | 3, orang | , orang |
| Sumbing | 2, orang | 2, orang |
| Cacat kulit | , orang | , orang |
| Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 2, orang | 1, orang |
| Cacat Mental | , orang | , orang |
| Idiot | , orang | , orang |
| Gila | 3, orang | 1, orang |
| Stress | 1, orang | , orang |
| Autis | , orang | 1, orang |
| **Jumlah** | **12, orang** | **6, orang** |

1. TENAGA KERJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tenaga Kerja** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| Penduduk usia 18-56 tahun | 412, Orang | 414, Orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | 64, Orang | 93, Orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang  belum atau tidak bekerja | 140, Orang | 155, Orang |
| Penduduk usia 0 – 6 tahun | 56, Orang | 112, Orang |
| Penduduk masih sekolah 7-18 th | 279, Orang | 188, Orang |
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | 365, Orang | 446, Orang |
| Angkatan kerja | 38, Orang | 39, Orang |
|  |  |  |
| **Jumlah** | **1.354 orang** | **1.447 orang** |
| **Jumlah total** | **2.801 orang** | |

J. KUALITAS ANGKATAN KERJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang  buta aksara dan huruf/angka latin | 2, orang | 2, orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD | 93, orang | 106, orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | 245, orang | 256, orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | 47, orang | 43, orang |
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang  tamat Perguruan Tinggi | 17, orang | 20, orang |
| Jumlah | 404, orang | 427, orang |

1. **POTENSI KELEMBAGAAN (Data Profil Desa 2019)**
   * + - 1. LEMBAGA PEMERINTAHAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | | | | |
| Dasar hukum pembentukan  Pemerintah Desa ~~/ Kelurahan~~ | Ada | | | **Perda**/Keputusan  Bupati/Camat/Belum  Ada Dasar Hukum |
| Dasar hukum pembentukan BPD | Ada | | | **Perda**/Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan  Desa | 12 orang | | | |
| Jumlah perangkat desa | 12 orang | | | |
| Kepala Desa | Ada | | | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada | | | |
| Kasi Pemerintahan | Ada/ Aktif | | | |
| Kasi Pelayanan | Ada/ Aktif | | | |
| Kasi Kesejagteraan | Ada /Aktif | | | |
| Kaur Keuangan | Ada/ Aktif | | | |
| Kaur TU dan Umum | | Ada/ Aktif | | |
| Kepala Perencanaan | | Ada/ Aktif | | |
| Kepala Urusan Keuangan | | Ada Aktif | | |
| Jumlah Staf | | - orang | | |
| Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan  di Kelurahan atau sebutan lain | | 4 dusun/lingkungan  Aktif | | |
| Kepala Dusun/Lingkungan 1 | | Aktif | | |
| Kepala Dusun/Lingkungan 2 | | Aktif | | |
| Kepala Dusun/Lingkungan 3 | | Aktif | | |
| Kepala Dusun/Lingkungan 4 | | Aktif | | |
|  | |  | | |
| Tingkat Pendidikan Aparat  Desa/Kelurahan | | SD, SMP, SMA, Diploma, S1,  Pascasarjana | | |
| Kepala Desa/Lurah | | SLTA | | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | | SLTA | | |
| Kasi Pemerintahan | | SLTA | | |
| Kasi Kesra | | SLTA | | |
| Kepala Pelayanan | | SLTA | | |
| Kaur Keuangan | | SLTA | | |
| Kaur TU dan Umum | | SLTA | | |
| Kaur Perencanaan | | SLTA | | |
|  | |  | | |
| **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** | | | | |
| Keberadaan BPD | | | Ada /Aktif | |
|  | | |  | |
| Jumlah Anggota BPD | | | 7.orang | |
|  | | |  | |
| Pendidikan Anggota BPD | | | SD, SMP, SMA, Diploma, S1,  Pascasarjana | | |  |
| Ketua : MUKMIN | | | SLTP | | |
| Wakil Ketua : HERU SUPRAPTO | | | SLTP | | |
| Sekretaris: LULUT FIANTO | | | S 1 | | |
|  | | |  | | |
| Anggota, Nama : NUR YUNIATI | | | SLTP | | |
| Anggota, Nama : ARIF WIKAMTO | | | SLTP | | |
| Anggota, Nama : DESI ARDIANA | | | SLTA | | |
| Anggota, Nama : TAHMID | | | SLTP | | |
|  | | |  | | |

B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

|  |  |
| --- | --- |
| **Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)** | |
|  | |
| Keberadaan LKD/LKK | tidak /tidak |

|  |  |
| --- | --- |
| Dasar hukum pembentukan |  |
|  |  |
|  | Bila Belum ada organisasi  LKD/LKK |
|  | Bila pembentukan LKD/LKK berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota |
|  | Berdasarkan Keputusan Bupati/ Wali kota |
|  | Berdasarkan Keputusan Camat |
|  | Tidak/belum ada dasar hukum |
|  |  |
| Jumlah pengurus | 8orang |
| Alamat kantor | Beji RT 04 RW 01 |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| **LKMD/LKMK** | |
| Dasar hukum pembentukan | Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 5 Orang |
| Alamat kantor | Beji RT 04 RW 01 |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Pembangunan dan Pemberdayaan |
| **LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN** | |
| Dasar hukum pembentukan | Perda dan Perdes |
| Jumlah pengurus | 12 orang |
| Alamat kantor | Beji RT 04 RW 01 |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat |
| **PKK** | |
| Dasar hukum pembentukan | SK Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 35 Orang  Orang |
| Alamat kantor | Beji RT 04 RW 01 |
| Ruang lingkup kegiatan | .........  Jenis , Yakni ...... |
| **RUKUN WARGA** |  |
| JUMLAH RW 5 unit organisasi | |
| Dasar hukum pembentukan | Perdes dan SK Kepala Desa Beji |
| Jumlah pengurus | 5 orang |
| Alamat kantor | Berada di rumah masing masing Ketua RW |
| Ruang lingkup kegiatan | 1Jenis , Yakni Pembinaan Kemasyarakatan |
| **RUKUN TETANGGA** |  |
| JUMLAH RT | 14 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Perdes danSK Kepala Desa Beji |
| Jumlah pengurus | 14 orang |
| Alamat kantor | Berada di rumah masing masing Ketua RT |
| Ruang lingkup kegiatan | 1Jenis , Yakni Pembinaan Kemasyarakatan |
|  |  |
| **KARANG TARUNA** |  |
| Dasar hukum pembentukan | SK Kepala Desa lawen |
| Jumlah pengurus | 10 orang |
| Alamat kantor | Desa Beji RT 04 RW 01  .....................................................  .................................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 Jenis , Yakni Pemberdayaan Pemuda |
|  |  |
| **KELOMPOK TANI** | 4 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | keputusan Kepala Desa Beji |
| Jumlah pengurus | 25 orang/ Kelompok |
| Alamat kantor | Rumah pengurus masing masing  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 1 Jenis , Yakni pertanian |
|  |  |
| **LEMBAGA ADAT** | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **BADAN USAHA MILIK DESA** | 2 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Perdes dan Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah pengurus | 6 orang |
| Alamat kantor | Beji RT 04 RW 01  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni UKM dan Pengelolaan gedung |
|  |  |
| **ORGANISASI KEAGAMAAN** | 3 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Keputusan Pengurus Daerah masing – masing |
| Jumlah pengurus | 45 orang |
| Alamat kantor | Ranting masing masing  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 jenis , yakni Keagamaan dan sosial |
|  |  |
| **ORGANISASI PEREMPUAN** LAIN | 3 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Keputusan Pengurus Daerah masing – masing |
| Jumlah pengurus | 50 orang |
| Alamat kantor | Kelompok masing masing  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Keagamaan dan sosial |
|  |  |
| **ORGANISASI PEMUDA** LAINNYA | 2 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | Keputusan Pengurus Daerah masing – masing |
| Jumlah pengurus | 40 orang |
| Alamat kantor | Organisasi masing - masing  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Sosial dan Keagamaan |
|  |  |
| **ORGANISASI PROFESI** LAINNYA | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| uang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **ORGANISASI BAPAK** | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | …Jenis , Yakni ………………... |
|  |  |
| **KELOMPOK GOTONG** ROYONG | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | ……………………………….. |
| Jumlah pengurus | ………………………………… orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
| PWI |  |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **IDI** |  |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
| PARFI |  |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **PECINTA ALAM** | ........................ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **WREDATAMA** |  |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **KELOMPOK PEMIRSA** | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  ..................................................... |
| uang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **PANTI..........................................** | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **YAYASAN....................................** | ............ unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Pemilik | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  .................................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **LEMBAGA..................................** |  |
| Dasar hukum pembentukan | .............................................  ....... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
|  |  |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |
|  |  |
| **LEMBAGA.....................................** |  |
| Dasar hukum pembentukan | .................................................... |
| Jumlah pengurus | ............................................orang |
| Alamat kantor | .....................................................  .....................................................  ......................................... |
| Ruang lingkup kegiatan | .........Jenis , Yakni ...... |

C. LEMBAGA POLITIK

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTAI GOLKAR** |  |
| Jumlah Pengurus | 6. orang |
| Jumlah Partai Politik Lokal | 1. orang |
| JumlahPartai Politik Nasional | 1. orang |
| Jumlah Anggota | 20. orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | 50. orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | Beji RT 02 RW 03 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Peraturan daerah |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 1 Jenis, Yakni Politik |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PDIP** |  |
| Jumlah Pengurus | ........................................orang |
| Jumlah Anggota | ........................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | ........................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PPP** |  |
| Jumlah Pengurus | ......................................orang |
| Jumlah Anggota | ......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | ......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................ |
| **PARTAI DEMOKRAT** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | .......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | .......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PAN** |  |
| Jumlah Pengurus | 6.orang |
| Jumlah Anggota | 20.orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | 1350.orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | Beji RT 01 RW 03 |
| Dasar Hukum Pembentukan | Keputusan Pimpinan Partai |
| Ruang Lingkup Kegiatan | 1 Jenis, Yakni Politik |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PKS** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | ........................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | ........................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................ |
|  | ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PBB** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | .......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | .......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................  .......... |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................  ..... |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PKB** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | .......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | .......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PBR** |  |
| Jumlah Pengurus | ......................................orang |
| Jumlah Anggota | ......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | ......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  .................... |
| **PDS** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | .......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | .......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................ |
| **PUI** |  |
| Jumlah Pengurus | ........................................orang |
| Jumlah Anggota | ........................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | ........................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................  .......... |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................  ..... |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  ....................  ................................................ |
| **PARTAI...........................................** |  |
| Jumlah Pengurus | .......................................orang |
| Jumlah Anggota | .......................................orang |
| Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir | .......................................orang |
| Alamat Sekretariat/Kantor | ................................................  ................................................ |
| Dasar Hukum Pembentukan | ................................................ |
| Ruang Lingkup Kegiatan | ....... Jenis, Yakni .............. |
| Organisasi Underbow | ................................................  ................................................  ................................................  ................................................  ....................  ................................................ |

D. LEMBAGA EKONOMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan** | Jumlah/  unit | Jumlah  Kegiatan | | | Jumlah  pengurus  dan  Anggota | | | |
| Koperasi Unit Desa | .................. | ............... | | | ............... | | | |
| Koperasi Simpan Pinjam | 1 unit | 1 kegiatan | | | 3 orang | | | |
| Kelompok Simpan Pinjam | .................. | ............... | | | ............... | | | |
| Bumdes |  |  | | |  | | | |
| .......................................... | ................. | ............... | | | ............... | | | |
| .......................................... | .................. | ............... | | | ............... | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **Jumlah** | **1 unit** | **1 kegiatan** | | | **3 orang** | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **2. Jasa Lembaga Keuangan** | Jumlah/unit | Jumlah kegiatan | | | Jumlah  Pengurus | | | |
| Jasa Asuransi | .................. | ............... | | | .................. | | | |
| Lembaga Keuangan Non Bank | .................. | ............... | | | .................. | | | |
| Bank Perkreditan Rakyat | .................. | ............... | | | .................. | | | |
| Pegadaian | .................. | ............... | | | .................. | | | |
| Bank Pemerintah | .................. | ............... | | | .................. | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **Jumlah** | **..................** | **...............** | | | **..................** | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **3. Industri Kecil dan Menengah** | Jumlah  Pemilik | Kapasitas | | | Tenaga  Kerja | | | |
| Industri makanan | 8 unit | 5 kegiatan | | | | 8 orang | |
| Industri Alat rumah tangga | 1 unit | 1 kegiatan | | | 1 orang | | | |
| Industri Material Bahan  Bangunan | 1 Unit | 1 Kegiatan | | | 4 Orang | | | |
| Industri Alat Pertanian | .................... | ............... | | | .................. | | | |
| Industri Kerajinan | .................... | ............... | | | .................. | | | |
| Rumah makan dan restoran | 8 Unit | 8 Kegiatan | | | 10 Orang | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **Jumlah** | **....................** | **...............** | | | **..................** | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| **4. Usaha Jasa Pengangkutan** | Jumlah  Pemilik | Kapasitas | | | Tenaga  Kerja | | | |
| Jumlah pemilik Angkutan  Desa/Perkotaan | 15 orang | 20 orang | | | 17 orang | | | |
| Angkutan Antar Kota/Provinsi | 9 unit | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Angkutan Sungai |  | | |  |  | | | |
| Jumlah Pemilik Perahu Motor/  Klotok atau sejenisnya | ..........orang | | | .... orang | ...... orang | | | |
| Jumlah pemilik Jet boat | ..........orang | | | .... orang | ....... orang | | | |
| Jumlah angkutan jetboat | ..........orang | | | .... orang | ....... orang | | | |
| Jumlah Pemilik Angkutan  Penumpang Sungai dgn kapasitas lebih dari 10 orang | ..........orang | | | .... orang | ...... orang | | | |
| Jumlah angkutan sungai yang  kapasitas kurang dari 10 kursi | ..............unit | | | | | | | |
| Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 10 – 100 |  | | | | | | | |
| Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 100 – 500 |  | | | | | | | |
| .................................... |  | | | | | | | |
| ................................... |  | | | | | | | |
| Angkutan Laut |  | |  | | | |  | |
| Jumlah pemilik Jet boat | ..........orang | | .... orang | | | | ....... orang | |
| Jumlah Pemilik Perahu Jenis  Ferry/Kapal penumpang | ..........orang | | .... orang | | | | ...... orang | |
| Jet Foil | ..........orang | | .... orang | | | | ....... orang | |
| ………………………….. |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
| Angkutan Udara |  | |  | | | |  | |
| Jumlah pemilik pesawat jenis ringan /helikopter | .............orang | | .... orang | | | | ....... orang | |
|  |  | |  | | | |  | |
| Ekspedisi Dan Pengiriman |  | |  | | | |  | |
| Jumlah Pemilik Usaha Jasa  Ekspedisi/Pengiriman Barang | .............orang | | .... orang | | | | ....... orang | |
|  |  | |  | | | |  | |
| **5. Usaha Jasa dan Perdagangan** | Jumlah | | Jenis produk yg  diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| Pasar Hasil Bumi/ Tradisonal/ Harian | ....... unit | | .......jenis | | | | ...... orang |
| Pasar Mingguan | ....... unit | | .......jenis .jenis | | | | ...... orang |
| Pasar Bulanan | ....... unit | | .....................jenis | | | | ...... orang |
| Pasar Kaget/Pasar Khusus  (mis. Psr Ternak, dll) | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Jumlah Usaha Toko/Kios | 23 unit | | 9 jenis | | | | 57 orang |
| Swalayan | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Warung Serba Ada | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Toko Kelontong | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Usaha Peternakan | 5 unit | | 1 jenis | | | | 10 orang |
| Usaha Perikanan | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Usaha Perkebunan | 14 unit | | 5.jenis | | | | ...... orang |
| Usaha Minuman  (kemasan, dll) | 1 unit | | 1.jenis | | | | 8. orang |
| ndustri Farmasi | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Industri Caroseri/cat  Mobil | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Industri Penyamakan Kulit | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Penitipan Kendaraan  Bermotor | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Industri Perakitan  Elektronik | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Pengolahan Kayu | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
|  |  | |  | | | |  |
| **6. Usaha Jasa Hiburan** |  | |  | | | |  |
| Bioskop | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Film Keliling | ....... unit | |  | | | |  |
| Sandiwara/Drama | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Group Lawak | ....... unit | |  | | | |  |
| Sirkus Keliling/Topeng monyet/Ondel-ondel, dll | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Wayang Orang/Wayang  Golek | ....... unit | |  | | | |  |
| Group Musik/Band | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Group Vokal/Paduan  Suara | ....... unit | |  | | | |  |
| .................................. |  | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| **7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air** |  | |  | | | |  |
| Usaha Penyewaan Tenaga  Listrik | 3 unit | | 1 jenis | | | | 3 orang |
| SPBU | ....... unit | |  | | | |  |
| Pangkalan Minyak Tanah | ....... unit | | ..........jenis | | | | ...... orang |
| Pengecer Gas dan Bahan  Bakar Minyak | 7 unit | | 3 jenis | | | | 7 orang |
| Usaha air minum kemasan/isi ulang | 1 unit | | 1 jenis | | | | 1 orang |
| **8. Usaha Jasa**  **Keterampilan** | Jumlah | | Jumlah Jenis  produk yang  diperdagangkan | | | | Jumlah Tenaga  Kerja yang  terserap |
| Tukang Kayu | 11 orang | | 2 jenis | | | | 25 orang |
| Tukang Batu | 31 orang | | 1 jenis | | | | 64 orang |
| Tukang Jahit/Bordir | 4 orang | | 1.jenis | | | | 4 orang |
| Tukang Cukur | 6 orang | | 1 jenis | | | | 6 orang |
| Tukang Service Elektronik | 2 orang | | 1 jenis | | | | 2 orang |
| Tukang Besi | 3 orang  o orang | | 1 jenis | | | | 3 orang  ang |
| Tukang Gali Sumur | 1 orang | | 1 jenis | | | | 1 orang |
| Tukang Pijat/  Urut/Pengobatan | ..... orang | | ...........jenis | | | | ...... orang |
| ............................ |  | |  | | | |  |
| ........................... |  | |  | | | |  |
| **9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultansi** | | | | | | |  |
| Notaris | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| Pengacara/Advokat | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| Konsultan Manajemen | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| Konsultan Teknis | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| Pejabat Pembuat Akta  Tanah | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| .................. ............. | ....... unit | | .........jenis | | | | .......orang |
| ................................ |  | |  | | | |  |
| **10. Usaha Jasa Penginapan** | | | | | | |  |
| Losmen | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Wisma | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Asrama | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Persewaan Kamar | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Kontrakan Rumah | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Mess | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Hotel | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Home Stay | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Villa | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| Town House | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| ............................... | ....... unit | | ..........jenis | | | | ..... orang |
| ................................. |  | |  | | | |  |

**E. LEMBAGA PENDIDIKAN**

1. Pendidikan Formal

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | JML | Status (Terdaftar, terakredit asi) | Kepemilikan | | | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
| Pemerintah | Swasta | Desa /  Kelurahan |
| Play Group | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 78 |
| TK | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 52 |
| SD/sederajat | 3 |  | 3 |  |  | 18 | 237 |
| SMP/sederajat | 1 |  | 1 |  |  | 32 | 565 |
| SMA/sederajat |  |  |  |  |  |  |  |
| PTN |  |  |  |  |  |  |  |
| PTS |  |  |  |  |  |  |  |
| SLB |  |  |  |  |  |  |  |
| ...................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ...................... |  |  |  |  |  |  |  |
| ...................... |  |  |  |  |  |  |  |

2. Pendidikan Formal Keagamaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | JML | | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan | | | Jumlah  Tenaga  Pengajar | Jumlah  siswa/ Mahasiswa |
| Pemer  ntah | Swasta | Dll |  |  |
| Sekolah Islam |  | |  |  |  |  |  |  |
| Raudhatul Athfal |  | |  |  |  |  |  |  |
| Ibtidayah | 2 | | 2 |  |  | 2 | 10 | 40 |
| Tsanawiyah |  | |  |  |  |  |  |  |
| Aliyah |  | |  |  |  |  |  |  |
| Ponpes |  | |  |  |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah  Katholik | |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminari  Menengah | |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminari tinggi | |  |  |  |  |  |  |  |
| Biara | |  |  |  |  |  |  |  |
| TK/SD | |  |  |  |  |  |  |  |
| SMP | |  |  |  |  |  |  |  |
| SMA | |  |  |  |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kursus | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah Budha | |  |  |  |  |  |  |  |
| .............. | |  |  |  |  |  |  |  |
| .............. | |  |  |  |  |  |  |  |
| .............. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah  Protestan | |  |  |  |  |  |  |  |
| TK/SD | |  |  |  |  |  |  |  |
| SMP | |  |  |  |  |  |  |  |
| SMA | |  |  |  |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kursus | |  |  |  |  |  |  |  |
| .............. | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah Hindu | |  |  |  |  |  |  |  |
| ............ | |  |  |  |  |  |  |  |
| ........... | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah  Konghucu | |  |  |  |  |  |  |  |
| ............ | |  |  |  |  |  |  |  |
| ............ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

3. Pendidikan Non Formal/Kursus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | JML | Status (Terdaftar, terakreditasi | Kepemilikan  (pemerintah, yayasan,dll) | Jumlah  Tenaga  Pengajar | Jumlah  siswa/ Mahasiswa |
| Komputer |  |  |  |  |  |
| Seni Musik |  |  |  |  |  |
| Montir |  |  |  |  |  |
| Menjahit |  |  |  |  |  |
| Drafter |  |  |  |  |  |
| Bahasa |  |  |  |  |  |
| Mesin |  |  |  |  |  |
| Satpam |  |  |  |  |  |
| Beladiri |  |  |  |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |  |
| Kecantikan |  |  |  |  |  |
| ................. |  |  |  |  |  |
| .................. |  |  |  |  |  |

F. LEMBAGA ADAT

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Keberadaan Lembaga Adat** | |
| Pemangku Adat | Ada/Tidak |
| Kepengurusan Adat | Ada/Tidak |
| **2. Simbol Adat** | |
| Rumah Adat | Ada/Tidak |
| Barang Pusaka | Ada/Tidak |
| Naskah-naskah | Ada/Tidak |
| ………………… | .................. |
| **3. Jenis Kegiatan Adat** | |
| Musyawarah adat | Ada/Tidak |
| Sanksi Adat | Ada/Tidak |
| Upacara Adat Perkawinan | Ada/~~Tidak~~ |
| Upacara Adat Kematian | Ada/~~Tidak~~ |
| Upacara Adat Kelahiran | Ada/Tidak |
| Upacara Adat dalam bercocok tanam | Ada/Tidak |
| Upacara Adat bidang perikanan/laut | Ada/Tidak |
| Upacara Adat bidang kehutanan | Ada/Tidak |
| Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam | Ada/Tidak |
| Upacara adat dalam Pembangunan rumah | Ada/Tidak |
| Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik | Ada/tidak |

G. LEMBAGA KEAMANAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Hansip dan Linmas** | | |
|  | | |
| Keberadaan Hansip dan Linmas | | Ada/~~tidak~~ |
| Jumlah anggota Hansip | | 30 orang |
| Jumlah anggota Satgas Linmas | | 30 orang |
| Pelaksanaan SISKAMLING | | Ada/~~tidak~~ |
| Jumlah Pos Kamling | | 9 buah |
| 2. Satpam Swakarsa | |  |
| Keberadaan SATPAM SWAKARSA | | Ada/Tidak |
| Jumlah anggota | | ..................orang |
| Nama organisasi induk | | .......................... |
| Pemilik organisasi | | Pemerintah/Swasta/ Perorangan |
| Keberadaan organisasi keamanan lainnya | | Ada/tidak |
| 3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI **–** POLRI dalam Bidang  TRANTIBLINMAS | | |
|  |  | |
| Mitra Koramil / TNI | Ada/~~tidak~~ | |
| Jumlah anggota | 1 Orang | |
| Jumlah kegiatan | ........ jenis kegiatan | |
| .......................... | ............................... | |
|  |  | |
| Babinkamtibmas / POLRI | Ada/~~tidak~~ | |
| Jumlah anggota | 1 Orang | |
| Jumlah kegiatan | ........ jenis kegiatan | |
| ......................... | ................................ | |

1. **POTENSI PRASARANA DAN SARANA (Data Profil Desa 2019)**

**A. SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI**

1. Prasarana Transportasi Darat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Sarana dan Prasarana | Baik  (km atau unit) | Rusak  (km atau unit) |
| 1.1. Jalan Desa/Kelurahan | | |
| Panjang jalan aspal | 1 km | 3 km |
| Panjang jalan makadam | …………… | 2 km |
| Panjang jalan tanah | …………… | 1 KM |
| Panjang jalan sirtu | …………… | …………… |
| Panjang jalan konblok/semen/beton | 500 M | …………… |
| 1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan | | |
| Panjang jalan aspal | …………… | ................. |
| Panjang jalan makadam | …………… | …………… |
| Panjang jalan tanah | …………… | …………… |
| Panjang jalan sirtu | …………… | …………… |
| Panjang jalan konblok/semen/beton | ............... | ................ |
| 1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | | |
| Panjang jalan aspal | 2 km | 1 km |
| Panjang jalan makadam | …………… | …………… |
| Panjang jalan tanah | …………… | …………… |
| Panjang jalan sirtu | …………… | …………… |
| Panjang jalan konblok/semen/beton | …………… | …………… |
| 1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | | |
| Panjang jalan aspal | …………… | …………… |
| Panjang jalan makadam | …………… | …………… |
| Panjang jalan tanah | …………… | …………… |
| Panjang jalan Sirtu | …………… | …………… |
| Panjang jalan konblok/semen/beton | …………… | …………… |
| 1.5. Panjang Jalan Negara |  |  |
| Panjang jalan aspal | …………… | …………… |
| Panjang jalan makadam | …………… | …………… |
| Panjang jalan tanah | …………… | …………… |
| Panjang jalan Sirtu | …………… | …………… |
| Panjang jalan konblok/semen/beton | …………… | …………… |
| 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan | | |
| Jumlah jembatan beton | …………… | 10 buah |
| Jumlah jembatan besi | …………… | …………… |
| Jumlah jembatan kayu | …………… | …………… |
| 1.6. Prasarana Angkutan Darat | | |
| Jumlah pangkalan ojek | ............... | …………… |
| Jumlah stasiun KA | …………… | …………… |
| Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan |  |  |
| Jumlah ........................ | …………… | …………… |
| Jumlah Total | …………… | …………… |

2. Sarana Transportasi Darat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bus umum | Ada/tidak - .............unit | |
| Truck umum | Ada/tidak - .............unit | |
| Angkutan Per-Desa/Kelurahanan | Ada/tidak - .............unit | |
| Ojek | Ada/tidak - .............unit | |
| Delman/bendi/cidomo | | Ada/tidak - .............unit |
|  | |  |
| Kereta api | | Ada/tidak - .............unit |
| ............................................................ | | Ada/tidak - .............unit |

3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah tambatan perahu | ................................ unit |
| Jumlah pelabuhan kapal penumpang | ................................ unit |
| Jumlah pelabuhan kapal barang | ................................ unit |
| ....................................................... | ................................ unit |

4. Sarana Transportasi Sungai/Laut

|  |  |
| --- | --- |
| Perahu motor | Ada/tidak - ..............unit |
| Kapal antar pulau | Ada/tidak - ..............unit |
| Perahu tanpa motor | Ada/tidak - ..............unit |
| Jet Boat | Ada/tidak - ..............unit |
| Kapal Pesiar | Ada/tidak - ..............unit |
| .............................................. | Ada/tidak - ..............unit |

5. Prasarana Transportasi Udara

|  |  |
| --- | --- |
| Lapangan terbang nasional/internasional | Ada/tidak-..........unit |
| Lapangan terbang perintis | Ada/tidak-..........unit |
| Lapangan terbang domestik | Ada/tidak-..........unit |
| Helipad | Ada/tidak-..........unit |
| Lapangan terbang komersial | Ada/tidak-..........unit |

B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Telepon

|  |  |
| --- | --- |
| Telepon umum | Ada/tidak ada-.............unit |
| Wartel | Ada/tidak ada-.............unit |
| Warnet | Ada/tidak ada-.............unit |
| Jumlah Pelanggan Telkom | ..............................orang |
| Jumlah Pelanggan GSM | ..............................orang |
| Jumlah Pelanggan CDMA | ..............................orang |
| Sinyal Telepon  Seluler/Handphone | Ada/~~tidak~~ |

2. Kantor Pos

|  |  |
| --- | --- |
| Kantor pos | ~~Ada~~/tidak ada-.............unit |
| Kantor pos pembantu | ada- 1 unit |
| Tukang pos | 1 orang |

3. Radio/TV

|  |  |
| --- | --- |
| TV umum | ~~Ada~~/tidak |
| Jumlah radio | Ada/tidak – 71 unit |
| Jumlah TV | 645 unit |
| Jumlah parabola | 254. unit |

4. Koran/majalah/buletin

|  |  |
| --- | --- |
| Koran/surat kabar | ~~Ada~~/tidak |
| Majalah | Ada/tidak |
| Papan iklan/reklame | ~~Ada~~/tidak |
| Papan pengumuman | Ada/~~tidak~~ |

C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

1. Prasarana air bersih

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah sumur pompa | 2 unit |
| Jumlah sumur gali | 12 unit |
| Jumlah hidran umum | .......................... unit |
| Jumlah PAH | .......................... unit |
| Jumlah tangki air bersih | .......................... unit |
| Jumlah embung | .......................... unit |
| Jumlah mata air | 10 Unit |
| Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum | 1 unit |

2. Sanitasi

|  |  |
| --- | --- |
| Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Ada |
| Sumur resapan air rumah tangga | 4 rumah |
| Jumlah MCK Umum | 4 Unit |
| Pemilik jumlah jamban keluarga | 445 KK |
| Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Baik 4 Unit /rusak  1 unit  Unit/mampet 1Unit/  kurang memadai.....  Unit |

D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

1. Prasarana Irigasi

|  |  |
| --- | --- |
| Panjang saluran primer | 1000. m |
| Panjang saluran sekunder | ............................ m |
| Panjang saluran tersier | ........................... m |
| Jumlah pintu sadap | 2 unit |
| Jumlah pintu pembagi air | 2 unit |

2. Kondisi

|  |  |
| --- | --- |
| Panjang saluran primer rusak | .......................... m |
| Panjang saluran sekunder rusak | .......................... m |
| Panjang saluran tersier rusak | .......................... m |
| Jumlah pintu sadap rusak | .......................... unit |
| Jumlah pintu pembagi air rusak | .......................... unit |

E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedung Kantor | Ada/~~tidak~~ | |
| Kondisi | Baik/~~Rusak~~ | |
| Jumlah ruang kerja | 3 Ruang | |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada/t~~idak~~  Rusak  ~~R~~ | |
| Listrik | Ada/~~tidak~~ | |
| Air bersih | Ada/t~~idak~~ | |
| Telepon | ~~Ada~~/tidak | |
| Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | ~~Ada~~/tidak | |
| Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | ~~ada~~/tidak | |
| **Inventaris dan alat tulis kantor** |  | |
| Jumlah mesin tik | 0 buah | |
| Jumlah meja | 20 buah | |
| Jumlah kursi | 100 buah | |
| Jumlah almari arsip | 3 buah | |
| Komputer | 6 unit | |
| Mesin fax | ..................unit | |
| Kendaraan dinas | 1 unit | |
| **Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan** | | |
| Buku Data Peraturan Desa | | Ada/ terisi |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | | Ada/ terisi |
| Buku administrasi kependudukan | | Ada/ terisi |
| Buku data inventaris | | Ada/ terisi |
| Buku data aparat | | Ada/ terisi |
| Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | | Ada/ terisi |
| Buku administrasi pajak dan retribusi | | Ada /tidak |
| Buku data tanah | | Ada/ terisi |
| Buku laporan pengaduan masyarakat | | Ada/ tidak |
| Buku agenda ekspedisi | | Ada /tidak |
| Buku profil desa/kelurahan | | Ada/ Terisi |
| Buku data induk penduduk | | Ada/ terisi |
| Buku buku data mutasi penduduk | | Ada/tidak, terisi/~~tidak~~ |
| Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | | Ada/tidak, terisi/~~tidak~~ |
| Buku registrasi pelayanan penduduk | | Ada/~~tidak~~, terisi/~~tidak~~ |
| Buku data penduduk sementara | | Ada/~~tidak~~, terisi/~~tidak~~ |
|  | |  |
| Buku anggaran penerimaan | | ~~Ada~~/tidak, terisi/tidak |
| Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | | ~~Ada~~/tidak, terisi/tidak |
| Buku kas umum | | Ada/~~tidak~~, terisi/t~~idak~~ |
| Buku kas pembantu penerimaan | | Ada/t~~idak~~, terisi/t~~idak~~ |
| Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | | Ada/~~tidak~~, terisi/t~~idak~~ |
| Buku data lembaga kemasyarakatan | | ~~Ada~~/tidak, terisi/tidak |
| ……………………………. | |  |

2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedung Kantor | Ada/tidak | |
| Ruangan Kerja | 3. ruang | |
| Balai BPD | Ada/~~tidak~~ | |
| Kondisi | Baik,/rusak | |
| Listrik | Ada/~~tidak~~ | |
| Air bersih | Ada/~~tidak~~ | |
| Telepon | ~~Ada~~/tidak | |
| **Inventaris dan Alat Tulis Kantor** |  | |
| Jumlah mesin tik | ................ buah | |
| Jumlah meja | ................ buah | |
| Jumlah kursi | ................ buah | |
| Jumlah almari arsip | ................ buah | |
| Komputer | ...........unit | |
| Mesin fax | .............unit | |
| ………………………… |  | |
| ………………………….. |  | |
| **Administrasi BPD** |  | |
| Buku-buku administrasi keanggotaan  BPD | Ada/~~tidak~~ | |
| Buku administrasi kegiatan BPD | | 5 Jenis |
| Buku kegiatan BPD | | Ada/~~tidak~~ |
| Buku Himpunan Peraturan Desa yang  3d.itetapkan BPD dan Kepala Desa | | Ada/~~tidak~~ |
| 4........................................ | |  |
| ....................................... | |  |
|  | |  |

3.Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain

|  |  |
| --- | --- |
| Gedung kantor atau Balai  Pertemuan | ~~Ada~~/tidak |
| Alat tulis kantor | ~~Ada~~/tidak |
| Barang inventaris | ~~Ada~~/tidak |
| Buku administrasi | 3 jenis |
|  | Terisi |
| Jenis kegiatan | 2 jenis |
| Jumlah pengurus | 3 orang |
| ............................. |  |
| ............................ |  |

F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan  Desa dan Kelurahan/LKD/LK | ~~Ada~~/tidak |
| Peralatan Kantor: komputer, fax | Ada |
|  |  |
| Mesin tik | ~~Ada~~/tidak |
| Kardek | ~~Ada~~/tidak |
| Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | ~~Ada~~/tidak |
| Jumlah meja dan kursi | .................. unit |
| ............................................... |  |
| ............................................... |  |
| .............................................. |  |
|  |  |
| **LKMD/LPM atau sebutan lain** |  |
| Memiliki kantor sendiri | tidak |
| Peralatan Kantor : komputer, fax | tidak |
| Mesin tik | tidak |
| Kardek | tidak |
| Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | .....................jenis |
| Jumlah meja dan kursi | .....................unit |
| Buku administrasi | 4.Jenis |
| Jumlah kegiatan | ...................Jenis |
| .......................... |  |
|  |  |
| **PKK** | Ada |
| Gedung/kantor | tidak |
| Peralatan kantor/ATK/inventaris | Ada |
| Kepengurusan | Ada |
| Aktif/t~~idak~~ |
| Buku administrasi PKK | Ada/~~tidak~~ |
| Jika ada, 7 jenis  enis |
| Kegiatan | Ada |
| Jumlah kegiatan | 2.jenis |
| **Karang Taruna** | Ada |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku administrasi | Tidak |
| Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
| .......................... |  |
| **RT** | Ada |
| Kepengurusan | Aktif |
| Buku administrasi | 3 Jenis |
| Jumlah kegiatan | 4 Jenis |
|  |  |
| **RW** | Ada |
| Kepengurusan | Aktif |
| Buku administrasi | 4 Jenis |
| Jumlah Kegiatan | 3 Jenis |
| ......................... |  |
| **Lembaga adat** |  |
| Memiliki kantor/gedung/menumpang | tidak |
| Kepengurusan | Aktif/tidak |
| Buku Administrasi | ...................Jenis |
| Jumlah Kegiatan | ...................Jenis |
|  |  |
| **BUMDES** | Ada/tidak |
| Memiliki kantor/gedung/menumpang | tidak |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | 4 Jenis |
| Jumlah Kegiatan | 1.Jenis |
| **Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan**  **Masyarakat** | Ada |
| Kantor/gedung/menumpang | tidak |
| Kepengurusan | Aktif/tidak |
|  |  |
| Buku administrasi | ada |
| Jumlah kegiatan | 2 Jenis |
| .......................... | ..................Jenis |
| .......................... |  |
|  |  |
| **Kantor/gedung Organisasi Sosial**  **Kemasyarakatan lainnya** | Ada/tidak |
| .............................................. | Ada/tidak |
| .............................................. | Aktif/tidak |
|  |  |
| **Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada** |  |
| ............................................. | Ada/tidak |
| ............................................ | Aktif/tidak |
| ............................................ |  |
| ............................................. |  |
| ............................................ |  |

G. PRASARANA PERIBADATAN

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Masjid | 11 buah |
| Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 5 buah |
| Jumlah Gereja Kristen Protestan | ................ buah |
| Jumlah Gereja Katholik | ................ buah |
| Jumlah Wihara | ................ buah |
| Jumlah Pura | ................ buah |
| Jumlah Klenteng | ................ buah |

H. PRASARANA OLAH RAGA

|  |  |
| --- | --- |
| Lapangan sepak bola | 2 buah |
| Lapangan bulu tangkis | 1 buah |
| Meja pingpong | 1 buah |
| Lapangan tenis | ................ buah |
| Lapangan voli | 2 buah |
| Lapangan golf | ................ buah |
| Pacuan kuda | ................ buah |
| Arum jeram | tidak |
| Lapangan basket | ................ buah |
| Pusat kebugaran | ................ buah |
| Gelanggang Remaja | tidak |
| ............................ | ........................... |

I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN

1. Prasarana Kesehatan

|  |  |
| --- | --- |
| Rumah sakit umum | ................ unit |
| Puskesmas | 1 unit |
| Puskesmas pembantu | ................ unit |
| Poliklinik/balai pengobatan | ................ unit |
| Apotik | ................ unit |
| Posyandu | 7 unit |
| Toko obat | ................ unit |
| Balai pengobatan masyarakat  yayasan/swasta | ................ unit |
| Gudang menyimpan obat | ................ unit |
| Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | .............unit |
| Rumah Bersalin | 1 unit |
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | ................ unit |
| Rumah Sakit Mata | ................ unit |
| ................................ | ........................ |
|  |  |
| ................................ |  |
| ................................ |  |

2. Sarana Kesehatan

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah dokter umum | ................ orang |
| Jumlah dokter gigi | ................ orang |
| Jumlah dokter spesialis lainnya | ................ orang |
| Jumlah paramedis | ................ orang |
| Jumlah dukun bersalin terlatih | 2 orang |
| Bidan | 1 orang |
| Perawat | 1 orang |
| Dukun pengobatan alternatif | ................ orang |
| Jumlah dokter praktek | ................ orang |
| Laboratorium kesehatan | ..................... |
| ................................. | ..................... |
| ................................. | ..................... |

J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedung kampus PTN | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| Gedung Kampus PTS | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| Gedung SMA/sederajat | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| Gedung SMP/sederajat | Sewa........ buah | milik sendiri 1 buah |
| Gedung SD/sederajat | Sewa........ buah | milik sendiri 3 buah |
| Gedung TK | Sewa........ buah | milik sendiri 2 buah |
| Gedung Tempat Bermain  Anak | Sewa........ buah | milik sendiri 3 buah |
| Jumlah Lembaga Pendidikan  Agama | Sewa........ buah | milik sendiri 9 buah |
| Jumlah perpustakaan keliling | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| Perpustakaan  desa/kelurahan | Sewa........ buah | milik sendiri 1 buah |
| Taman bacaan | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| ....................................... | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |
| ....................................... | Sewa........ buah | milik sendiri... buah |

K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

|  |  |
| --- | --- |
| Listrik PLN | 613 unit unit |
| Diesel umum | unit |
| Genset pribadi | 14 unit |
| Lampu minyak tanah/jarak/kelapa | Keluarga |
| Kayu bakar | 532 Keluarga |
| Batu bara | Keluarga |
| Tanpa penerangan | Keluarga |
|  |  |

L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Tempat Wisata | ...................buah |
| Hotel bintang 5 | ...................buah |
| Hotel bintang 4 | ...................buah |
| Hotel bintang 3 | ...................buah |
| Hotel bintang 2 | ...................buah |
| Hotel bintang 1 | ...................buah |
| Hotel melati | ...................buah |
| Diskotik | ...................buah |
|  |  |
| Bilyar | ...................buah |
| Karaoke | ...................buah |
| Museum | ...................buah |
| Restoran | ...................buah |
| Bioskop | ...................buah |
| ………………………….. | ...................buah |

M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN

|  |  |
| --- | --- |
| Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 6 Lokasi |
| Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 4 Lokasi |
| Alat penghancur sampah//incinerator | tidak |
| Jumlah gerobak sampah | …….….. Unit |
| Jumlah tong sampah | 35 Unit |
| Jumlah truck pengangkut sampah | ………….Unit |
| Jumlah Satgas Kebersihan | …………..Kelompok |
| Jumlah anggota Satgas Kebersihan | ……………. Orang |
| Jumlah pemulung | 5 Orang |
| Tempat pengelolaan sampah | tidak |
| Pengelolaan sampah lingkungan/RT | Pemerintah/Swasta/**Swadaya** |
| Pengelola sampah lainnya | tidak |
|  |  |

**BAB III**

**PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan diartikan sebagai proses, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain dan masalah adalah sesuatu (persoalan) yang harus diselesaikan (dipecahkan).

Permasalahan pembangunan merupakan *“gap expectation”* (kesenjangan harapan) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan Masalah Prioritas yang akan ditangani selama 6 (enam) tahun dalam RPJMDesa Beji dikelompokkan berdasarkan Bidang, Sub Bidang sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDesa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara yang dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan uraian sebagai berikut:

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

* + - 1. **Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
  1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
  2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
  5. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
  6. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
  7. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
  8. Operasional Perkantoran; dan
  9. Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa
     + 1. **Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa**
       2. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
       3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
       4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
       5. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
       6. Pengelolaan Aset Desa;
       7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
       8. Pengelolaaan Pungutan Desa non administrasi; dan
       9. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
       10. **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan** 
           1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
           2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)\*\*;
           3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
           4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
           5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
           6. Penyelenggaraan Arsip Desa;
           7. Pendataan Desa;
           8. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
           9. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
           10. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
           11. Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
       11. **Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan**

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKPDes,dll);

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/ APB Des Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);

Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

Pengembangan Sistem Informasi Desa;

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)\*\*;

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

Pengelolaan informasi Desa;

Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;

Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD\*\*;

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan

Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

* + - 1. **Sub Bidang Pertanahan**

Sertifikasi Tanah Kas Desa;

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa \*\*

Penetapan dan penegasan batas Desa;

Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;

Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

Pengelolaan Tanah kas Desa;

Tanah Bengkok; dan

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. **Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:**
2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
3. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Alat Peraga Edukatif, Sarana PAUD, dst);
4. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa \*\*;
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*;
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*;
9. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
10. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
11. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya\*\*;
12. **Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**
    * + 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
        2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
        3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
        4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
        5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
        6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
        7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
        8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
        9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD \*\*
        10. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) \*\*;
        11. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa\*\*;
        12. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas\*\*; dan
        13. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan\*\*.
13. **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:**
14. Pemeliharaan jalan Desa;
15. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
16. Pemeliharaan jalan usaha tani;
17. Pemeliharaan jalan dan jembatan milik Desa;
18. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
19. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
20. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
21. Pemeliharaan embung milik Desa;
22. Pembangunan Rabat beton jalan desa
23. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
24. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa \*\*;
25. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang\*\*;
26. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani \*\*;
27. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa \*\*;
28. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)\*\*;
29. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan\*\*;
30. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa \*\*;
31. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa \*\*;
32. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa \*\*;
33. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa\*\*;
34. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam\*\*;
35. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa\*\*;
36. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian\*\*
37. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang\*\*.
38. **Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:**
39. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
40. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
41. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
42. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
43. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
44. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah\*\*;
45. **Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:**
46. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
47. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup\*\*;
48. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa\*\*;
49. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah\*\*;
50. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian\*\*; dan
51. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian\*\*.
52. **Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:**
53. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
54. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban APB Desa untuk warga dll);
55. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
56. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong\*\*; dan
57. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) \*\*.
58. **Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:**
59. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik\*\*;
60. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini\*\*; dan
61. **Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**
62. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Berdasarkanhasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

* 1. **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**

1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
4. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
5. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
6. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
7. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
8. Pembentukan tim keamanan Desa;
9. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin\*\*; dan
10. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat\*\*.
11. **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan :**
12. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
13. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
14. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
16. Pembinaan kerukunan umat beragama;
17. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
18. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
19. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
20. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
21. **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:**

Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;

Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa

Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;

Pembinaan pemuda dan olah raga;

Pembinaan anak usia dini;

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;

Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;

Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan

Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

1. **Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**
2. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan

**4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :**

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
2. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst);
3. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan\*\*;
4. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
5. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
6. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan\*\*;
7. Pelatihan kelompok tani; dan
8. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi\*\*.
9. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
10. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
11. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
12. Peningkatan kapasitas BPD;
13. Pelatihan bagi kepala Desa / perangkat Desa / Badan Permusyawaratan Desa\*\*;
14. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/ kader kesehatan masyarakat Desa\*\*;
15. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa\*\*;
16. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa\*\*;
17. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas\*\*;
18. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam\*\*.
19. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
20. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
21. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
22. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
23. Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa\*\*;
24. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui\*\*;
25. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas\*\*;
26. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman\*\*;
27. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan\*\*;
28. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru PAUD/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan\*\*;
29. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter\*\*; dan
30. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal\*\*.
31. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
32. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
33. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
34. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
35. Bantuan modal untuk kelompok tani;
36. Pelatihan Kewirausahaan;
37. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin\*\*;
38. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa\*\*;
39. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya\*\*;
40. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:
41. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dll)\*\*;
42. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
43. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan\*\*;
44. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta\*\*; dan
45. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga\*\*.

**5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. **Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:**

Penanggulangan Bencana.

1. **Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:**

Keadaan Darurat.

1. **Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:**
2. Keadaan Mendesak.

**BAB IV**

**VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

**A. VISI**

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

**VISI :**

Mewujudkan Masyarakat Desa Beji yang **SEJAHTERA** **Lahir maupun Batin, ADIL dan BERADAB**, Berdaya Saing yang Tinggi disegala bidang khususnya diwilayah kecamatan Pandanarum dan umumnya dilingkup yang lebih luas

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (tiga) pokok visi, yaitu:

1. **Desa Beji menjadi Desa yang Sejahtera Lahir Maupun Batin.**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya bisa membawa masyarakatnya sejahtera lahir maupun batin artinya tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perekonomian.

1. **Desa Beji menjadi Desa yang Adil dan beradab**

Adil dan beradap artinya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma – norma dan kebudayaan umumnya. Juga mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama. Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam memberikan keadilan bagi warganya.

* + 1. **MISI :**

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

**HASTHA KARSA dan KARYA 8 (Delapan) Langkah** yang akan dilaksanakan guna mencapai Visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Beji yang Adil, Profesional, Transfaran, Bersih, Kapabel, Evektif, Evesien dan terbebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Fasilitasi program ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha sektor jasa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, permodalan, sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, serta penerapan tekhnologi pertanian tepat guna dan pola kemitraan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa bidang pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi umum, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepemudaan dan olah raga;
4. Memberantas pengangguran melalui program Padat Karya Tunai, Pendidikan dan latihan usaha jasa dan kewirausahaan, aktif menggalang informasi lowongan pekerjaan, serta menggali potensi desa guna membuka kesempatan dan peluang kerja baru.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan desa dan kader-kader desa dengan fasiliatasi penguatan SDM dan operasional kegiatan yang mencukupi.
6. Meningkatkan peran serta wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara memaksimalkan fungsi PKK, Posyandu, dan organisasi kewanitaan lainnya;
7. Mengoptimalkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) guna meningkatkan PADes dan sarana menampung hasil-hasil produksi dan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara transfaran, berkeadilan, profesional dan terbebas dari KKN;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggalian gagasan dari kelompok terkecil masyarakat dan keperpihakan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat yang bergotong royong, berswadaya dan semangat kekeluargaan, melestarikan norma dan budaya yang berkembang dimasyarakat desa Beji yang tidak bertentangan agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam membangun Desa Beji dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Beji

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga.
4. Mewujudkan dan meningkatkan sumber saya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
5. Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
6. Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

**3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Beji Kecamatan Pandanarum Desa Beji selama periode Tahun 2020 – 2025.

**Misi pertama :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Beji yang Adil, Profesional, Transfaran, Bersih, Kapabel, Evektif, Evesien dan terbebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada rasa keadilan, merata dan seimbang yangdisusun secara buttom up dari unsur masyarakat terkecil sampai dengan tingkat Musdes.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, yang dilaksanakan secara intensif dan kuratif, dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Memfungsikan semua kelembagaan desa sesuai tupoksi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kontrol dan pengawasan pemerintahan desa, dan memangkas berokrasi pelaporan warga untuk hal - hal yang bersifat *urgent.*

**Misi Kedua :**

Fasilitasi program ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha sektor jasa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, permodalan, sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, serta penerapan tekhnologi pertanian tepat guna dan pola kemitraan;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

* + - 1. Pelatihan Kelompok Tani.
      2. Pelatihan UMKM.
      3. Bantuan modal untuk usaha kecil.
      4. Pelatihan Ternak Sapi
      5. Pelatihan ternak kambing
      6. Pelatihan sarana produksi dan pemasaran

**Misi Ketiga :**

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa bidang pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi umum, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepemudaan dan olah raga;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

Pembangunan Kantor Desa

Pembangunan Parkir sepeda motor

Pembangunan Kantor Lembaga Desa

Pembangunan tempat pelayanan Paten

Rehab Jalan Desa

Pembangunan Gedung TPQ

Pembangunan Gedung TK / PAUD.

Pempangunan Pos kamling dan

Pembangunan fisik lainnya.

**Misi Keempat :**

Memberantas pengangguran melalui program Padat Karya Tunai, Pendidikan dan latihan usaha jasa dan kewirausahaan, aktif menggalang informasi lowongan pekerjaan, serta menggali potensi desa guna membuka kesempatan dan peluang kerja baru.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

* + - 1. Melaksanakan Pembangunan fisik dengan sistem padat karya.
      2. Melaksanakan pembangunan fisik dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
      3. Mengadakan pelatihan kewirausahaan, atau kerajinan.
      4. Mencari informasi kepada dinas lain, terkait pelatihan pelatihan yang bisa dibiayai oleh Daerah.

**Misi Kelima :**

Meningkatkan kualitas kelembagaan desa dan kader-kader desa dengan fasiliatasi penguatan SDM dan operasional kegiatan yang mencukupi.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

Mengadakan pelatihan bagi LKD.

Memberikan operasional untuk jalannnya LKD.

Mengikutsertakan LKD dalam rapat desa.

Memberikan insentif bagi LKD sesuai aturan yang ada.

Mendorong LKD untuk bekerja sesuai tupoksinya.

**Misi Keenam :**

Meningkatkan peran serta wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara memaksimalkan fungsi PKK, Posyandu, dan organisasi kewanitaan lainnya;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

* + - 1. Memberikan bantuan operasional bagi PKK
      2. Memberikan insentif bagi Posyandu, SKD, dan FKD
      3. Melaksanakan pertemuan rutin tiap bulan yang melibatkan semua organisasi kewanitaan.
      4. Mengadakan Pelatihan – pelatihan bagi kader PKK, Posyandu, SKD dan FKD.
      5. Melibatkan segala kegiatan Desa dengan keterwakilan wanita. Seperti Musdus, Musdes, dll

**Misi Ketujuh :**

Mengoptimalkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) guna meningkatkan PADes dan sarana menampung hasil-hasil produksi dan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara transfaran, berkeadilan, profesional dan terbebas dari KKN;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

* + - 1. Menunjuk pengurus yang profrsional dan bertanggungjawab.
      2. Membentuk unit baru yang menangani pembelian hasil pertanian
      3. Mendorong unit yang sudah ada untuk dikelola dengan benar.
      4. Memberikan penyertaan modal yang cukup.
      5. Mengadakan Pelatihan bagi pengurus BUMDes.

**Misi Kedelapan :**

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggalian gagasan dari kelompok terkecil masyarakat dan keperpihakan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat yang bergotong royong, berswadaya dan semangat kekeluargaan, melestarikan norma dan budaya yang berkembang dimasyarakat desa Beji yang tidak bertentangan agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

* + - 1. Mengadakan Musyawarah Dusun dengan melibatkan semua unsur.
      2. Mengadakan Musyawarah Desa dengan melibatkan semua unsur.
      3. Meningkatkan swadaya gotong royong.
      4. Memberikan dorongan kepada pelaku budaya dengan cara memberikan bantuan peralatan.

**4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 - 2025 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Beji sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Menumbuhkembangkan Bumdes secara maksimal, dengan menunjuk pengurus yang berfikir maju dan bertanggungjawab.
2. Memberikan penyertaan modal tambahan kepada BUMDes, agar modal tercukupi, dan pendapatan meningkat.
3. Mendirikan unit baru seperti pelayanan pembelian hasil pertanian masyarakat maupun mendirikan unit yang lain, yang menguntungkan.

**PREDIKSI PENDAPATAN DESA BEJI**

**TAHUN 2020 - 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sumber Pendapatan** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Pendapatan Asli Desa*** | ***51.450.000*** | ***52.950.000*** | ***52.950.000*** | ***53.450.000*** | ***53.450.000*** | ***53.450.000*** |
| Hasil Usaha | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Hasil Aset | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 33.750.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 33.750.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Pendapatan Transfer*** | ***1.422.819.274*** | ***1.465.562.274*** | ***1.465.562.274*** | ***1.465.562.274*** | ***1.465.562.274*** | ***1.465.562.274*** |
| Dana Desa | 957.257.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten | 24.151.000 | 24.151.000 | 24.151.000 | 24.151.000 | 24.151.000 | 24.151.000 |
| Alokasi Dana Desa | 378.618.000 | 378.618.000 | 378.618.000 | 378.618.000 | 378.618.000 | 378.618.000 |
| **Bantuan Keuangan** |  |  |  |  |  |  |
| Bantuan Provinsi | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| Bantuan Kabupaten | 7.793.274 | 7.793.274 | 7.793.274 | 7.793.274 | 7.793.274 | 7.793.274 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Pendapatan Lain lain*** | ***5.000.000*** | ***5.000.000*** | ***5.000.000*** | ***5.000.000*** | ***5.000.000*** | ***5.000.000*** |
| Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |  |  |  |  |  |  |
| Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **JUMLAH TOTAL** | **1.479.269.274** | **1.480.769.274** | **1.480.769.274** | **1.482.769.274** | **1.482.769.274** | **1.482.769.274** |

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

|  |
| --- |
| 1.   Penghematan anggaran |
| 2.   Mengutamakan kegiatan yang lebih penting |
| 3.   Pembagian anggaran untuk bidang Pembangunan lebih besar dari kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan anggaran. |

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijkan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

**PREDIKSI**

**ALOKASI INDIKATIF BELANJA**

**DESA BEJI**

**TAHUN 2020 - 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN BELANJA | TAHUN | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| ***Belanja Desa*** |  |  |  |  |  |  |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 493.361.148 | 475.760.274 | 475.760.274 | 477.769.274 | 477.769.274 | 477.769.274 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 920.457.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 119.153.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | - | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| **JUMLAH TOTAL** | **1.537.941.148** | **1.480.769.274** | **1.480.769.274** | **1.482.769.274** | **1.482.769.274** | **1.482.769.274** |

c**.** Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

**BAB V**

**PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF**

**BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG**

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Beji yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJMDesa yakni: pembentukan tim penyusun RPJMDesa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJMDesa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJMDesa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020 - 2025 adalah dalam Bidang penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG**  **DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ........... TAHUN …………… - ..................** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi  (  RT/  RW/ Dusun) | Pra-kiraan Volume | Sasaran  /  Manfaat | Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-) | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
| Bidang |  | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah  (Rp) | Sumber ( APBN/ APBD I/ APBD II  / APBDesa ) | Swa-kelola | | Kerja-  sama Antar Desa | Kerja-  sama Pihak Ketiga |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| *a* | *B* | *c.* | *D* | *E* | *F* | *G* | *h* | *I* | *j* | *k* | *l* | *M* | *N* | *o* | *p* | *q* | | *r* | *s* |
| **1** | **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Jumlah Per Bidang 1** | | | | | | | | | |  |  |  |  | - |  |  | |  |  |
| **2** | **Pembangunan Desa** | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Jumlah Per Bidang 2** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | **Pembinaan Kemasyarakatan** | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4** | **Pemberdayaan Masyarakat** | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Dst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5** | **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa** | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| c.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG** | | | | | | | | | |  |  |  |  | - |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RPJMDesa Beji pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Matrik Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | RPJMDesa ….. Kecamatan ........... Kabupaten Banjarnegara  Tahun 2020-2025 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDIKATOR KINERJA | | | | | SATUAN | | KONDISI CAPAI-AN KINERJA TAHUN | TARGET  CAPAIAN KINERJA  TAHUN | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|  | *1* | | | | | *2* | | *3* | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | *8* | *9* | *10* | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Terkelolanya Aset Desa | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Kepemilikan KTP-el | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Rasio bayi berakte kelahiran | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 3.Rasio Pasangan berakte nikah | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 4.Pengelolaan Arsip secara Baik | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Tersedianya Perdes RPJMDesa | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Tersedianya Perdes RKPDesa | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 3.Tersedianya Perdes APBDesa | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 6.Meningkatnya Jumlah PADesa | | | | Rp. Juta | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang pertanahan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | | | | Bidang | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pendidikan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 1. Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kesehatan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Menurunnya Angka Kematian Bayi | | | | Kasus | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 3.Menurunnya Angka Kematian Balita | | | | Kasus | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 4. Menurunnya Balita Gizi Buruk | | | | Kasus | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 5.Menurunnya Angka Kematian Ibu | | | | Kasus | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 6.Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Panjang jalan Desa dalam kondisi baik | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Rasio Rumah Layak Huni | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 3.Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Persentase Penanganan Sampah | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika | | | | |  | |  | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet | | | | % | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain | | | | Dokumen | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang energi dan sumber daya mineral | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa | | | | Jenis | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang Pariwisata Desa | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Kunjungan Wisatawan ke Desa | | | | Orang | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | | | | Kegiatan | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Populasi Kambing/Domba | | | | Ekor | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Populasi Sapi | | | | Ekor | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | | |  | |  | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 1.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaran Desa | | | | Kegiatan | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa | | | | Kegiatan | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 3.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa | | | | Kegiatan | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | | | | Orang | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  |  | 2. Penanganan Keluarga Miskin (BDT) | | | | Rumah Tangga Miskin | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1. Jumlah UMKM di Desa | | | | Usaha | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | 1.Terbentuknya BUMDesa | | | | Jenis Usaha | | ...... | ...... | | ...... | | ...... | | ...... | ...... | ...... | ...... | |
|  | DST. | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Beji Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2020-2025 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2019 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2020 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025, khususnya yang terdapat di tahun 2021.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2026 maupun 2027 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Banjarnegara. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusun RKPDesa tahun 2026 maupun APBDesa Tahun 2026.

Kaidah Pelaksanaan

RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Beji
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakat Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Beji Tahun 2020 sampai tahun 2026, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.
5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mulai Tahun 2020-2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Alloh *Subahanahu Wa Ta’ala*  meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Beji pada khususnya dan Warga Indonesia pada umummnya. Aamiin.

Kepala Desa

**SUPENI**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(berisi Rancangan RPJMDesa, yang harus dilampirkan sesuai ketentuan), Contohnya :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa | |
| 2 | Data Desa | |
|  | 2.1 | Daftar sumber daya alam |
|  | 2.2 | Daftar sumber daya manusia |
|  | 2.3 | Daftar sumber daya pembangunan |
|  | 2.4 | Daftar sumber daya sosial budaya |
| 3 | Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/atau masyarakat | |
|  | 3.1 | Daftar gagasan Dusun/ Kelompok |
|  |  | 3.1.1 Sketsa Desa |
|  |  | 3.1.2 Kalender Musim |
|  |  | 3.1.3 Bagan Kelembagaan |
| 4 | Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa | |
|  | 4.1 | Laporan hasil pengkajian keadaan Desa |
| 5 | Berita acara penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa | |
| 6 | Rancangan RPJMDesa | |
| 7 | Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa | |
| 8 | SK Kepala Desa tentan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa | |
| 9 | Dokumen lain terkait yang perlu untuk dilampirkan | |

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA……………………………...

NOMOR : / TAHUN 20……..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA……………………………….,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan kentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa…………… tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.... Kecamatan......Kabupaten..... Tahun……………; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ........ Tahun ........... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun ........ Nomor ......); 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ........ Tahun ...... tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun ...... Nomor ......); 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor .......... Tahun 20.. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20... Nomor ..); 16. Peraturan Desa ................ Nomor....... Tahun ......... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .. -..... (Lembaran Desa ........................... Tahun ... Nomor ..); 17. Peraturan Desa .......... Nomor ….. Tahun .... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun .......... (Lembaran Desa ......... Tahun ...... Nomor …..); 18. Peraturan Desa .......... Nomor ….. Tahun ......... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ........ (Lembaran Desa ........................... Tahun ...... Nomor …..); |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa............ Kecamatan............. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

* 1. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
  2. pengkajian keadaan Desa;
  3. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
  4. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

KETIGA :Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ……….

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................

pada tanggal .....................

KEPALA DESA ...........

*NAMA LENGKAP (tanpa gelar)*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA…………

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA............ KECAMATAN............. KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2020-2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN DALAM DINAS** | **JABATAN DALAM TIM** | **BESARNYA HONORARIUM**  **(Rp.)** | **KETERANGAN** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 |  | Kepala Desa | Pembina | 200.000 | Diberikan sebanyak sebanyak .... (...) kali, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2 |  | Sekretaris Desa | Ketua | 150.000 |
| 3 |  | Ketua LP3M | Sekretaris | 135.000 |
| 4 |  | Perangkat Desa | Anggota | 115.000 |
| 5 |  | Anggota LP3M | Anggota | 115.000 |
| 6 |  | KPMD | Anggota | 115.000 |
| 7 |  | Unsur Perempuan | Anggota | 115.000 |
| Dst |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |

KEPALA DESA…………………,

NAMA TERANG

(TANPA GELAR)